Editor :
- DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E. S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.Sc., M.M., C.CW., C.JKP
- Ika Widiastuti, S.IP, M.AP, Ph.D, CBPA, CPRW, C.GL

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.
Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si
Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP
Dr.(c)., Mu'ijjah, S.Si., M.Sc.
Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.

SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB 1 LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN MPR MENURUT UUD 1945
DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.

BAB 2 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

BAB 3 ADMINISTRASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA
Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si

BAB 4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP

BAB 5 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
Dr.(c)., Mu'jijah, S.Si., M.Sc.

BAB 6 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

BAB 7 PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Yasir Riady, S.S., M.Hum.

BAB 8 PEMILIHAN UMUM
Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.

Editor :

- DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E. S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.Sc., M.M., C.CW., C.JKP
- Ika Widiastuti, S.IP, M.AP, Ph.D, CBPA, CPRW, C.GL

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-189-0
9 786234 871890

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.
Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si
Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP
Dr.(c)., Mu'jijah, S.Si., M.Sc.
Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.

eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penulis : DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.; DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.; Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si; Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP; Dr.(c)., Mu'jijah, S.Si., M.Sc.; Yasir Riady, S.S., M.Hum. Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.

Editor : DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E. S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.Sc., M.M., C.CW., C.JKP

Ika Widiastuti, S.IP, M.AP, Ph.D, CBPA, CPRW, C.GL

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-189-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2022

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini kami beri judul "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia". Memaparkan tentang segala bentuk sistem administrasi dari suatu negara khususnya Indonesia. Salah satu substansi dari buku ini yaitu membahas tentang lembaga-lembaga pemeintahan sesuai Undang-Undang Dasar, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Administrasi pemerintahan juga dijelaskan dari tingkat pemerintahan desa/kelurahan hingga pemerintahan daerah. Perhelatan demokrasi terbesar berupa pemilu juga dituliskan dalam buku ini, dari mulai sejarah, pengertian, sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga buku ini menjadi hal penting dalam mempelajari sistem administrasi negara Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI.....iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR.....viii
BAB 1 LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN MPR MENURUT UUD 1945 1
A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara (Presiden & MPR) Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen. 1
B. Lembaga Negara dan Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945) 11
Daftar Pustaka..... 18
Tentang Penulis..... 21
BAB 2 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA..... 24
A. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen) 24
B. Lembaga Negara dan Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945) 46
Daftar Pustaka..... 53
Tentang Penulis..... 55
BAB 3 ADMINISTRASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA..... 56
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perusahaan-Perusahaan Negara..... 56
B. Privatisasi BUMN 64

C. Monopoli dan Demonopolisasi BUMN 68
Daftar Pustaka..... 72
Tentang Penulis 75
BAB 4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH . 77
A. Pengertian Pemerintah Daerah..... 77
B. Ciri-Ciri Daerah yang Berotonom 82
C. Desentralisasi 84
D. Studi Komparatif: Penerapan Konsep *Local Government* di Pemerintah Daerah Australia dan Kanada 94
E. Pemerintah Daerah di Dunia Global..... 99
F. Partisipasi dan Tata Kelola Pemerintahan..... 102
G. Restrukturisasi dan Perubahan..... 109
Daftar Pustaka..... 115
Tentang Penulis 126
BAB 5 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN..... 127
A. Pendahuluan 127
B. Jenis-Jenis Administrasi Pemerintahan Desa ... 138
Daftar Pustaka..... 145
Tentang Penulis 148
BAB 6 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH..... 149
A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi Daerah..... 149
B. Prinsip dan Perubahan Otonomi Daerah 154
C. Permasalahan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah..... 159
Daftar Pustaka..... 163
Tentang Penulis 165

BAB 7 PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 166
A. Partai Politik 173
B. Fungsi Partai Politik 174
C. Mewakili Kelompok Kepentingan..... 175
D. Organisasi Kemasyarakatan..... 176
Daftar Pustaka..... 179
Tentang Penulis..... 181
BAB 8 PEMILIHAN UMUM 182
A. Pengertian Pemilu 182
B. Pelaksanaan Pemilu..... 183
C. Sejarah Pemilu..... 188
Daftar Pustaka..... 209
Tentang Penulis..... 211

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jenis dan Bentuk Administrasi Desa.....139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Peserta Partai Politik 2019.....175
Gambar 6.2 Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia 176

BAB 1

LEMBAGA KEPRESIDENAN DAN MPR MENURUT UUD 1945

DR., D.Sc., Drs., Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si.
Dosen di Jabodetabek
Email: Sunarnosa.pratama@gmail.co.id

A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara (Presiden & MPR) Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen.

1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen);

- Indonesia Negara yang Berdasar Hukum (*Rechsstaat*)
  "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).
- Sistem Konstitusional
  "Pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)."

Daftar Pustaka

Amin, Zainul Ittihad (2009); Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Aminoto (20017); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Budimansyah, Dasim (2007); Pengembangan Kurikulumdan Pembelajaran PKN. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Cholisin, dkk (2007); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Darmanto, dkk (2007); Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Daryono, Triyono & SB Gumbira (2019); Interprestasi dan Penalaran Hukum. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Delianoor, N.A., (2017); Tindak Pidana Khusus. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djaenuri, Aries, dkk (2003); Sistem Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djahiri, A Kosasih, dkk (2007); Ilmu Politik dan Kenegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Fatmawati (20017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Tentang Penulis

Sunarno Sastro Atmodjo, lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen (1964), SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta (1970), Sarjana Muda (Bacaloreat II) Geologi UP Yogyakarta (1974), Diploma BPA UGM Yogyakarta (1978), Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat) Biologi UGM (1978), Sarjana Biologi UGM Yogyakarta (1981), Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta (1998), Magister Biologi FMIPA UI Depok (2002), Program Doktor PKLH UNJ Jakarta (2005), Sarjana Adminstrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta (2007), Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta (2009), Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta (2011), Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta (2014), Magister Manajemen UIPM Malaysia (2017), Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta (2017), Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta (2019), Doktor Kehormatan Bidang Konservasi BCB dan Sumberdaya Pariwisata dari UIPM Malaysia (2020).

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Setjen Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar,.

Pernah sebagai nara sumber dalam ± 40 seminar/lokakarya/workshop /diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam ± 40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada semester pertama tahun 2021, telah menerbitkan 20-an buku di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Teknik Kimia Industri, Mata Kuliah Dasar Umum, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, dan beberapa lainnya.

Mengajar ± 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, Geografi; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketum IPJERI.

Pada tahun 2021, menjadi penulis dan editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung,

Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi, Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil biterbitkan pada tahun 2021 berjumlah lebih dari 20 buah.

Alamat:

1. Kompleks Pejuang Pratama C8 & C-9, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, 17131.
2. Kompleks Puri Harapan Blok E-14 No: 20, Setia Asih, Tarumajaya, Kab Bekasi.
3. Bumijo Tengah Jt. I No:1314, Jetis, Kota Yogyakarta.
4. Sambi 173, Sambi, Sambirejo, Sragen.

BAB 2

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

A. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

1. Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

a. Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945

1) Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dinyatakan sebagai berikut :

> "… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …"

2) Dalam penjelasan pasal 1 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut :

Daftar Pustaka

Affandi, Idrus (2007) Pendidikan Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Akhadiah, Sabarti, dkk (1984); Pendidikan Kewiraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Alhaj, SZS Pangeran (1984); Pendidikan Pancasila. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Amin, Zainul Ittihad (2009); Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Aminoto (20017); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Budimansyah, Dasim (2007); Pengembangan Kurikulumdan Pembelajaran PKN. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Cholisin, dkk (2007); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Darmanto, dkk (2007); Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djaenuri, Aries, dkk (2003); Sistem Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djahiri, A Kosasih, dkk (2007); Ilmu Politik dan Kenegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Fatmawati (20017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Kadarwati, Tri (2007); Perbandingan Administrasi Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Tentang Penulis

Dr. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

Riwayat Pendidikan

- SDN.WLahar ll Kecamatan Larangan Kab.Brebes
- SMPN1.MARGASARI Kab.Tegal
- STM PGRI 4 KOTA TANGERANG
- IAIN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- UNBAR BANDUNG
- UHAMKA JAKARTA
- STIA YAPPAN JAKARTA

Saya anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Dan Buku ini saya Abadikan untuk mengenang Almarhum R. Sukim Ali Sastro (Bapak). Almarhumah St. Kastini (Ibu) dan Almarhumah Warsinah (Kakak Pertama), Almarhum Aries Tarisso (Kakak kedua), Almarhumah Dewi/Desti (Kakak keenam)

Serta Saudara Kandung saya yang mendukung saya untuk terus belajar, yaitu: Daryunah (Kakak Ketiga), Paduko Tarwito (Kakak Keempat), Komi Kurisah (Kakak Ketujuh), M. Ali Kodikin (Adik).

Buat yang selalu setia mendukung kemajuan dalam perjuangan hidup, yaitu Wardaningsih. S. Pd. (Istri)

Serta teruntuk Mata Hati saya, yaitu: Noor Nindhya Nawangwulan (Putri Pertama), Noor Andhiny Prahara Syekti (Putri Kedua)

BAB 3

ADMINISTRASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA

Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si
Universitas Patompo
Email: nawirrahman@stkippi.ac.id

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perusahaan-Perusahaan Negara

Perusahaan negara atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dikenal sejak era pemerintahan Orde Lama. Menurut Media BUMN (2019: 2), praktik perusahaan negara di Indonesia berawal dari praktik pemerintah kolonial dalam memonopoli opium, pegadaian, pos, bank, industri telegraf dan telepon, listri, serta kereta api yang dikelola oleh sebuah badan usaha yang bernama *Department van Gouvernementsbedrijven*. Lalu, pasca Konferensi Meja Bundar, pemerintah Indonesia mendapatkan kepemilikan yang besar atas fasilitas publik dari Belanda, seperti bus, kereta api, bank, dan perusahaan komunikasi (Media BUMN, 2019: 2). Hal tersebut berlanjut hingga era demokrasi terpimpin di

Daftar Pustaka

Alif, M. R. (2013). Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *43*(3), 381–408.

Asnawi, D. S. (2002). *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai salah satu Pilar Utama Ekonomi Nasional*. Studia Press.

Djohan, A. (2008). *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Harvarindo.

Esmara, H., & Cahyono, H. (2000). *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Soemitro Djojohadikusumo*. Pustaka Sinar Harapan.

Ginting, M. M., Sirait, N. N., & Windha. (2013). Pengecualian Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN Sesuai Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Ekonomi*, *2*(2), 1–8.

Harahap, S. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Integratif* (M. Yafiz (ed.)). FEBI UIN-SU Press.

Hartini, R. (2017). *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Setara Press.

Kamal, M. (2011). Konsep Corporate Governance di Indonesia : Kajian atas Kode Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Teknologi*, *10*(2).

Kansil, C. (2013). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.

Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. FHUII Press.

Media BUMN. (2019). *Apa Itu BUMN? Pengertian BUMN,*

Tentang Penulis

Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si, lahir di Sompu, 15 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Isti Ekatama Upaweda, Yogyakarta. Tahun 2008 menyelesaikan studi Magister Manajemen di STIA LAN Makassar dan tahun 2015 berhasil menyelesaikan Program Doktor dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Di tahun 2004 – 2009, 2009-2014 dan 2014-2019 sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Takalar sembari menjadi pengajar LB di berbagai kampus swasta di Makassar. Selepas dari parlemen di akhir 2019, beralih profesi dari politisi ke dunia kampus dan menjadi pengajar tetap di STKIP Pembangunan Indonesia Makassar dan beberapa kampus swasta lainnya.

Beberapa artikel yang ditulisnya termuat pada harian lokal di Makassar, yaitu: Bermimpi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, Kolom Opini Harian Fajar Makassar, 11 Mei 2011; Mengurus Rakyat Bukan Perkara Mudah, Kolom Opini Harian Fajar, 13 Juli, 2011; Berlomba meraih kekuasaan dalam Pemilukada, 10 Februari 2016, Harian Rakyat Sulsel; dan menulis Buku Kelembagaan Legislasi (Peta Jalan Politik Menuju Penguatan), Fahmis Pustaka 2017.

Selain itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kader Golkar Termuda di Sulsel yang terpilih menjadi Anggota DPRD Tahun 2004 dan menjadi bagian dari 100 Politisi

Berpengaruh di Sulselbar Tahun 2015 versi Harian Rakyat Sulsel. Saat ini masih memegang amanah sebagai Ketua PC FKPPI dan Ormas Kosgoro Kabupaten Takalar.

BAB 4 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar
Email: wijaya.indra0293@gmail.com

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Salah satu jalan untuk mencapai gagasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah "pemerintah daerah" adalah dengan mencari asal-usul historis dari ungkapan tersebut. Hal tersebut amat luar biasa betapa sangat modern istilah itu. Hal itu menjadi topik utama dalam diskursus sehari-hari para kaum ilmuwan dan praktisi sampai paruh kedua abad kesembilan belas. Pada abad sebelumnya, para penulis tentang administrasi negara Inggris merujuk pada "pemerintah bawahan", yang dengannya mereka mengumpulkan mesin-mesin untuk menegakkan hukum-hukum kerajaan; tetapi ide yang agak berbeda terletak di balik istilah modern. Penjajaran kata "lokal" dan "Pemerintah" muncul dari frasa di mana

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Reed, T., & Robinson, J. A. (2014). Chiefs: Economic development and elite control of civil society in Sierra Leone. *Journal of Political Economy*, *122*(2), 319–368.

Adams, D., & Hess, M. (2001). Community in public policy: fad or foundation? *Australian Journal of Public Administration*, *60*(2), 13–23.

Aijaz, R. (2007). *Challenges for urban local governments in India*.

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-Poi, M. (2019). Does elite capture matter? Local elites and targeted welfare programs in Indonesia. *AEA Papers and Proceedings*, *109*, 334–339.

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. (2012). Targeting the poor: evidence from a field experiment in Indonesia. *American Economic Review*, *102*(4), 1206–1240.

Anderson, S., Francois, P., & Kotwal, A. (2015). Clientelism in Indian villages. *American Economic Review*, *105*(6), 1780–1816.

Araujo, M. C., Ferreira, F. H. G., Lanjouw, P., & Özler, B. (2008). Local inequality and project choice: Theory and evidence from Ecuador. *Journal of Public Economics*, *92*(5–6), 1022–1046.

Arikan, G. G. (2004). Fiscal decentralization: A remedy for corruption? *International Tax and Public Finance*, *11*(2), 175–195.

Tentang Penulis

Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP, lahir di Ujung Pandang, 6 Februari 1993 dan dalam perjalanan studi formal, penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D/IV) di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada tahun 2014 dengan konsenterasi pendidikan pekerjaan sosial dan pada tahun 2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan magister di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar dengan konsenterasi manjemen sumber daya aparatur dan pada tahun 2022 menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Negeri Makassar dengan konsenterasi administrasi publik. Sejak tahun 2015, penulis berprofesi sebagai PNS di Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan per 31 Desembe 2021 penulis diamanahkan sebagai peneliti ahli muda pada Unit Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sampai sekarang. Selain itu, penulis juga melaksanakan kegiatan pengajaran atau dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar sejak 1 Januari 2022 sampai sekarang.

BAB 5 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

Dr.(c)., Mu'jijah, S.Si., M.Sc.
Universitas Mathla'ul Anwar Banten (Dosen Prodi Biologi)
dan
(Mahasiswa S3 Biologi UGM)
Email: mujijah@gmail.com

A. Pendahuluan

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka harus didorong dengan desentralisasi urusan administrasi pemerintahan desa, demi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa (Higau.2015). Pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur negara dimana pemerintah adalah pelayan masyarakat terutama yang berkaitan dengan

Daftar Pustaka

Fitria, A.Y. 2019. Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli. *Makala*h. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya Indralaya. Palembang.

Gie, T.L 1997. Kamus Administrasi. Jakarta: PT. Gunung Agung

Gie, T.L1983. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Nur Cahaya

Higau, C. B. H. 2015. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Mahakam Ulu. *e.Journal Ilmu Pemerintahan* 3 (3) : 1448-1459

Mintron, M. 2016. Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. Oxford University Press.

Pandiangan, R. 2015. Administrasi Pendidikan. Fakultas Pendidikan dan Keguruan Departemen Pendidikan Bahasa Inggris. Universitas Islam Sumatera Utara. Medan

Pasalong, H. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Jakarta. Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Peraturan+Pemerintah+Nomor+72+Tahun+2005+tentang+Desa. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022

Tentang Penulis

Mu'jijah, S.Si., M.Sc, Lahir di Pandeglang, 02 Maret 1970. Lulus S1 Prodi Biologi Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten tahun 2004. Lulus S2 Prodi Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2012. Tahun 2011-2015 menjadi Dekan Fakultas MIPA UNMA Banten. Tahun 2015-2019 menjadi Dekan Fakultas Sains dan Farmasi UNMA Banten. Saat ini sedang studi lanjut S3 Prodi Doktor Biologi UGM (2021-sekarang). Kegiatan lain saat ini sebagai Auditor Halal, dan Fasilitator Desa Inklusif. Tahun 2020 menjadi Reviewer salah satu jurnal penelitian Universitas Khairun.

BAB 6

SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH

DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan sebagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sejumlah 11 bidang pemerintahan.

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 dengan tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan di samping membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan

Daftar Pustaka

Affandi, Idrus (2007) Pendidikan Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Akhadiah, Sabarti, dkk (1984); Pendidikan Kewiraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Alhaj, SZS Pangeran (1984); Pendidikan Pancasila. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Amin, Zainul Ittihad (2009); Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Aminoto (20017); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Budimansyah, Dasim (2007); Pengembangan Kurikulumdan Pembelajaran PKN. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Cholisin, dkk (2007); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Darmanto, dkk (2007); Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djaenuri, Aries, dkk (2003); Sistem Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Djahiri, A Kosasih, dkk (2007); Ilmu Politik dan Kenegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Fatmawati (20017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Kadarwati, Tri (2007); Perbandingan Administrasi Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Kadir, Gau (2004); Pembangunan Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Tentang Penulis

Dr. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.

Riwayat Pendidikan

- SDN.WLahar ll Kecamatan Larangan Kab.Brebes
- SMPN1.MARGASARI Kab.Tegal
- STM PGRI 4 KOTA TANGERANG
- IAIN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- UNBAR BANDUNG
- UHAMKA JAKARTA
- STIA YAPPAN JAKARTA

Saya anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Dan Buku ini saya Abadikan untuk mengenang Almarhum R. Sukim Ali Sastro (Bapak). Almarhumah St. Kastini (Ibu) dan Almarhumah Warsinah (Kakak Pertama), Almarhum Aries Tarisso (Kakak kedua), Almarhumah Dewi/Desti (Kakak keenam)

Serta Saudara Kandung saya yang mendukung saya untuk terus belajar, yaitu: Daryunah (Kakak Ketiga), Paduko Tarwito (Kakak Keempat), Komi Kurisah (Kakak Ketujuh), M. Ali Kodikin (Adik).

Buat yang selalu setia mendukung kemajuan dalam perjuangan hidup, yaitu Wardaningsih. S. Pd. (Istri)

Serta teruntuk Mata Hati saya, yaitu: Noor Nindhya Nawangwulan (Putri Pertama), Noor Andhiny Prahara Syekti (Putri Kedua)

BAB 7

PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Universitas Terbuka
Email: yasir@ecampus.ut.ac.id

Jika dalam hidup dalam bermasyarakat, kita bisa menyuarakan berbagai macam pendapat kita mengenai informasi atau subjek apa pun yang kita inginkan. Sesuai undang-undang, hak-hak yang dijamin kepada kita dalam konstitusi kita, setiap individu bisa dan dapat membuat ide-ide mereka diketahui oleh masyarakat. Secara alami orang-orang dengan pandangan dan ide yang sama akan cenderung membentuk kelompok bersama. Kelompok-kelompok ini, atau partai-partai adalah bagian penting dari sistem politik kita.

Satu orang saja tidak bisa benar-benar mengubah apa pun, pada umumnya sebuah ide atau demonstrasi yang dilakukan oleh satu orang bisa mendapatkan perhatian tetapi biasanya dibutuhkan kelompok besar yang bersama-sama untuk bisa diperhatikan, sangat mudah bagi kelompok (semakin besar semakin baik) untuk bisa diakui jika mereka memiliki ide untuk diusulkan kepada pemerintah. Melalui

Daftar Pustaka

Aksara. Wilopo. (1978), Zaman Pemerintahan Partai-partai, Jakarta, Yayasan Idayu.

Sopiah. (2008). Budaya organisasi, komitmen organisasional pimpinan dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan bank. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 12(2), 308– 317.

Sutrisno, H. E. (2010). Pengaruh budaya organisasi, stress kerja dan komitmen terhadap kinerja karyawan CV. Bintang Karya Putra di Surabaya. EKUITAS : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 14(4), 460–477.

Suprapto, Bibit. (1985), Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Malang, Balai

Syaifuddin. (2012). Pengaruh faktor-faktor manajerial terhadap budaya organisasi serta implikasinya pada kinerja manajerial. Trikonomika, 11(1), 58–68.

Tanuwibowo, J. C., & Sutanto, E. M. (2014). Hubungan budaya organisasi dan komitmen organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_17.pdf

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-

Tentang Penulis

Yasir Riady, S.S., M.Hum.

Yasir Riady merupakan pengajar di Universitas Terbuka pada bidang Jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi, merupakan salah satu peneliti, penulis, pustakawan di Jakarta. Menyelesaikan studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi untuk Magister dan Sastra Inggris untuk gelar sarjananya, saat ini aktif pada beragam kegiatan seminar daring sebagai moderator dan juga pembicara.

BAB 8 | PEMILIHAN UMUM

Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si
Universitas Negeri Makassar
Email : risma.niswaty@unm.ac.id

A. Pengertian Pemilu

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Morrisan (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Daftar Pustaka

A.G. Sudarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;

Austin Ranney. 1996. Governing : An Introduction to Political Science. New Jersey: Prentice Hall

Morissan. 2005. Hukum Tata Negara Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelanggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum dan wakil pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang Penulis

DR. Risma Niswaty, S.S., M.Si, lahir di Makassar 26 Januari 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesusastraan Inggris di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi magister Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2003 menjadi dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Tahun 2003-2010 menjadi Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa. Pendidikan doktoral ditempuhnya tahun 2008-2013 di Universitas Negeri Makassar pada kajian Ilmu Administrasi Publik. Pada tahun 2009, mendapatkan kesempatan mengikuti Sandwich Program dari DIKTI ke Flinders University, Adelaide Australia.

Beberapa artikel yang ditulisnya termuat pada harian lokal di Makassar, yaitu: Otokritik atas KPU Sulsel; Opera Sabun van Timsel KPUD; dan DK KPU Sulsel dan Inkonsistensi Kebijakannya. Berkontribusi sebagai penulis artikel pada penyusunan Buku Potret Perempuan dan Anak: Praktik Budaya dan Tradisi Masyarakat Berbagai Daerah di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Juga menjadi penulis kedua untuk buku ajar berjudul *Standard Learning Material and Asessment for Hospitality (Based On National Competency Standard)* pada tahun 2014. Di tahun

2018, menjadi penulis modul Humas dan Keprotokolan untuk Modul Hybrid Learning program Manajemen Perkantoran dan secara kompilasi bersama dosen-dosen perempuan di UNM menerbitkan buku yang berjudul *Kartini Era 4.0: Catatan Kecil Perempuan UNM*. Selanjutnya pada tahun 2019 menulis buku *Etika Komunikasi* yang diterbitkan oleh Rajawali Press. Pada tahun 2022, bersama Andi Cudai Nur dan Haedar Akib, menyusun buku yang berjudul *Eksistensi Administrasi Publik pada Arus Globalisasi*.